

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN,
SISTEM PENGAWASAN MELEKAT DAN PRINSIP TRANSPARANSI
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)
(STUDI EMPIRIS PADA DPRD KABUPATEN REMBANG)**

Rosa Nikmatul Fajri, Djumali, Sri Hartono

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: rosanikmatulfajri@mail.ugm.ac.id; djumali@uniba.ac.id;
hartonosri61@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dilaksanakan pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah realisasi anggaran pada Sekretariat, mengetahui keefektifan dan keefesiansian dari sistem pengawasan melekat dan membuktikan bahwa prinsip transparansi sudah optimal dalam penyelenggaraannya. Sumber data dan metode pengumpulan data penelitian utama yang diperlukan adalah menggunakan data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari responden melalui survey, kuesioner dan purposive sampling. Analisis data menggunakan Smart Partial Least Square (SmartPLS). Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa 1) t statistik $>$ dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik $>$ t tabel 1,96). Ini berarti bahwa Hipotesis1 (H_1) yang menyatakan bahwa “Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD”, 2) pengaruh sistem pengawasan melekat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD mempunyai t statistik sebesar 3,150699. Jadi t statistik $>$ dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik $>$ t tabel 1,96), ini berarti bahwa Hipotesis2 (H_2) yang menyatakan bahwa “Sistem pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.”, dan 3) pengaruh prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD mempunyai t statistik sebesar 7,270543. Jadi t statistik $>$ dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik $>$ t tabel 1,96), ini berarti bahwa Hipotesis3 (H_3) yang menyatakan bahwa “Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD”.

Kata-kata kunci: Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat, Prinsip Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

PENDAHULUAN

Menurut UNDP (United Nation Development Program), akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance*, yang menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sedangkan menurut Turner dan Hulme (1997), bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan prinsip akuntabilitas sangat penting dan perlu diperhatikan untuk dilaksanakan karena prinsip ini dapat membantu badan atau instansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban kepada publik, baik segi hasil maupun segi finansial melalui pemeriksaan keuangan yang digunakan penilaian atas kinerja yang diperoleh. Akuntabilitas hasil tersebut sebenarnya tidak melihat dari segi input maupun output melainkan melihat dari segi *outcome*-nya. Sedangkan akuntabilitas finansial melihat

penggunaan dana secara efektif dan efisien serta tidaknya kebocoran dana tersebut. Dan juga bahwa prinsip akuntabilitas ini dianggap sangat menguntungkan apabila prinsip ini diterapkan untuk proses pengelolaan keuangan, terutama keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada instansi-instansi pemerintahan daerah.

Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD pada instansi-instansi pemerintahan daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 156 menjelaskan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD dilaksanakan oleh para pejabat daerah dalam hal ini para kepala instansi pemerintah daerah, yang selanjutnya dilaporkan kembali hasil pelaksanaan tersebut kepada pelimpah kekuasaan keuangan dalam hal ini adalah kepala daerah.

Dengan keadaan yang demikian itu maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem informasi keuangan daerah menurut Departemen Keuangan RI (2006) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, mengelola data pengelolaan keuangan daerah, data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Menurut Forum dosen akuntansi sektor publik (2006) bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Untuk mempermudah proses pengelolaan APBD, pemerintah daerah berusaha menggalakkan penerapan sistem informasi yang dapat membantunya untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah dalam jangka periode tertentu kepada publik. Hal ini juga diungkapkan oleh Mardiasmo (2002) bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Demi mendukung pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBD maka sebuah sistem informasi keuangan daerah yang menganut prinsip transparansi tersebut harus disertai dengan sistem pengendalian, karena fungsi sistem pengendalian merupakan alat untuk menjaga asas transparansi yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Dalam pemerintahan, digunakan istilah sistem pengawasan untuk mengacu penggunaan istilah sistem pengendalian karena secara formal hanya bersifat memberikan saran dan secara murni tidak memiliki hak untuk melakukan koreksi. Menurut Anthony dan Govindrajan (2011) bahwa sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya bersifat pengulangan untuk melakukan sekelompok aktivitas. Namun, berbeda dengan pendapat Krismiaji (2005) bahwa sistem ini dapat didefinisikan serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) (2003) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian dari pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan menurut Baswir (1995 dalam Ulum MD 2009), pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) (2003), bahwa bentuk-bentuk pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah setiap upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara independen terhadap obyek yang diawasinya.

2. Pengawasan Melekat

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat disebutkan bahwa pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sistem pengawasan melekat di instansi pemerintah pada hakikatnya hanya untuk menghindari adanya tindak penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui sistem pengawasan melekat diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Penelitian yang diangkat ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro (2011) yang meneliti mengenai hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan: kualitas informasi laporan keuangan sebagai variable intervening. Dengan mereplikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro (2011), penulis hanya ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda dan terdapat perubahan variabel dari penelitian sebelumnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem informasi keuangan daerah, pengawasan melekat dan prinsip transparansi sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Adapun pemilihan lokasi penelitian di DPRD Kabupaten Rembang diambil dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah yang pembiayaan pelaksanaan tugasnya bersumber dari APBD yang sudah barang tentu harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel; 2) Untuk saat ini, DPR dan DPRD menjadi sorotan publik baik yang menyangkut kinerjanya maupun anggarannya, sehingga menarik untuk diteliti; 3) Penulis berasal dari Kabupaten Rembang, sehingga akan lebih memudahkan pengambilan data-data yang diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem informasi keuangan daerah mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?
2. Apakah penerapan sistem pengawasan melekat mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?
3. Apakah penerapan prinsip transparansi mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?

Kerangka teoritik

Aribowo (2007 dalam Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro 2011) mengemukakan bahwa akuntabilitas menunjukkan kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintahan. Selain itu, menurut Sulistoni (2003 dalam Sopanah dan Wahyudi 2010), pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; (3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan (5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan dikatakan memiliki akuntabilitas apabila kegiatan tersebut dapat dilaporkan hasilnya secara akurat, tepat waktu dan terbuka bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, *accountable* berarti memiliki kemampuan melaporkan hasil secara akurat dan tepat waktu dan terbuka.

Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD

Menurut Mardiyanto (2009), Sistem Informasi Keuangan / Finansial merupakan sistem informasi yang memberikan informasi kepada seluruh manager keuangan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Aktifitas-aktifitas keluaran dari sistem informasi keuangan yaitu peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui perusahaan dan mengendalikan keuangan perusahaan.

Menurut Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004, informasi keuangan yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip: 1) akurat adalah suatu tindakan yang mencerminkan ketelitian, kecermatan dan ketepatan; 2) relevan adalah suatu keadaan yang sesuai dengan kondisi obyektif sekarang dan masa datang; dan 3) dapat dipertanggungjawabkan adalah suatu kondisi atau fakta yang dapat diperbandingkan secara angka nominal dan matematis.

Menurut Kharisma (2012), fungsi utama dari sistem informasi keuangan daerah adalah: 1) membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban; 2) menyusun laporan keuangan yang lebih efektif dan akurat; 3) menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya; dan 4) menyajikan informasi yang akurat, efektif dan efisien bagi pengguna laporan.

Dikaitkan dengan uraian mengenai akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan yang akurat akan mempengaruhi informasi/pengelolaan keuangan yang akurat juga, sehingga hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan adanya hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka penerapan sistem informasi keuangan dapat berperan positif dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan APBD.

Pengaruh sistem pengawasan melekat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD

Nawawi (1989 dalam Deutary 2012) mengemukakan bahwa pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahan agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan melekat merupakan proses atau usaha-usaha untuk mengawasi serta mengendalikan pegawai secara langsung yang dilakukan oleh setiap unsur pimpinan dalam suatu organisasi, sehingga dirasakan lebih efektif untuk mampu menjangkau semua lini dalam unit kerja yang ada. Sedangkan menurut Nawawi (1998), tujuan dari pengawasan melekat untuk mewujudkan daya guna, hasil guna, dan tepat guna dalam upaya mencapai sasaran-sasaran di dalam program-program pemerintahan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran akhir dari pengawasan melekat adalah menjaga agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan maksimal dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian kegiatan yang dikawal dengan pengawasan melekat yang dilakukan terus menerus oleh atasan secara langsung dapat menghasilkan keluaran yang akurat, karena terhindar dari penyimpangan penyimpangan, dan dapat dipertanggungjawabkan karena lebih efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan kegiatan.

Apabila pelaksanaan pengawasan melekat tersebut dapat membawa hasil yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat atas pengelolaan keuangan berkontribusi positif terhadap terwujudnya akuntabilitas pengelolaan APBD. Dengan kata lain pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

Prinsip transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD

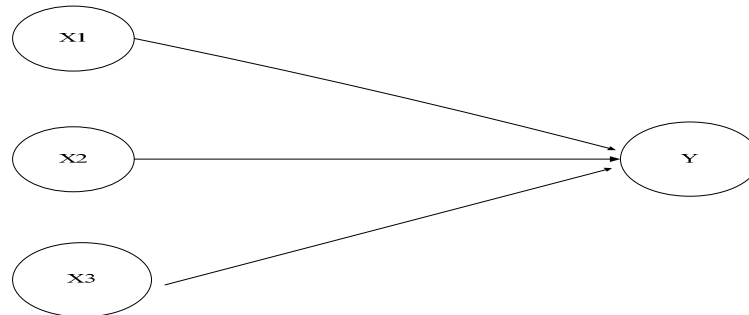
Menurut Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002) mengemukakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan transparansi menurut Mardiasmo (2002) yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut: 1) penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab; 2) kemudahan akses informasi; 3) menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap; dan 4) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Menurut Silviana (2012) dua elemen penting dalam transparansi pemerintahan: 1) adanya akses, kemungkinan seseorang untuk mendapatkan informasi terhadap aktivitas pejabat pemerintahan; 2) adanya akurasi informasi, artinya informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan atau valid. Dan tujuan transparansi dalam pemerintahan: 1) mengurangi apatisme masyarakat terhadap pribadi pejabat pemerintah; 2) memudahkan pelaksanaan audit atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah; 3)

meminimalisasikan konflik kepentingan antara rakyat dengan pejabat pemerintah dan antar pejabat.

Berdasarkan uraian diatas, maka skema berpikir tentang pengaruh sistem informasi keuangan daerah, penerapan sistem pengawasan melekat dan penerapan prinsip transparansi terhadap terciptanya akuntabilitas pengelolaan APBD dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

X1 adalah penerapan sistem informasi keuangan;

X2 adalah sistem pengawasan melekat;

X3 adalah prinsip transparansi atas keuangan;

Y adalah akuntabilitas pengelolaan APBD.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Maka Pemerintah Daerah dituntut memiliki sistem informasi yang andal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki masih lemah, kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang andal. Oleh karena itu dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi, Wahyundaru (2001 dalam penelitian Atarwaman 2008). Sehingga hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:

H1: Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

2. Pengaruh sistem pengawasan melekat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD

Menurut sulistoni (2003 dalam penelitian sopanah dan wahyudi 2010), pemerintah yang accountable memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat; 2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; 4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan 5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. hal ini juga di dukung oleh pendapatnya rubin (1996) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan

partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (apbd). sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan dipengaruhi oleh fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, sehingga hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:

H2 : sistem pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

3. Pengaruh prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD

Transparansi terkandung juga didalamnya secara tersirat bagaimana pemerintah daerah harus melaporkan rencana, pengelolaan dan juga laporan akhir yang berupa laporan keuangan anggaran-anggaran yang dibutuhkan dan juga digunakan oleh pemerintah daerah secara transparan sehingga masyarakat luas dapat ikut mengetahuinya. Hal ini diperkuat adanya pendapat Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:

H3: Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah keseluruhan kelompok yang terdiri dari orang, peristiwa atau sesuatu yang ingin diteliti penulis. Populasi dalam penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Rembang karena objek ini dapat mewakili dari seluruh keuangan di Kabupaten Rembang. Sampel adalah bagian dari populasi. Menurut Widjaja (2005) bahwa administrasi diacukan sebagai kegiatan yang bersifat tulis-menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi atau usaha. Kegiatan-kegiatan administrasi meliputi mengetik, mengirim surat, mencatat keluar dan masuknya, penyimpanan arsip, pekerjaan secretariat lainnya (proses pelayanan), kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan. Maka dari itu, penelitian ini mengambil sampel bagian sekretariat DPRD kabupaten Rembang yang terdiri dari 60 pegawai sehingga data yang diperoleh lebih akurat atau tidak ada bias dalam mencapai hasil yang lebih besar. Dengan adanya 60 pegawai maka penulis menyebarkan kuesioner penelitian sebanyak 60 kuesioner. Namun yang kembali hanya 14 kuesioner.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data primer ini terdiri dari beberapa cara yaitu metode survei, metode *purposive sampling* dan kuesioner. Metode pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei, metode *purposive sampling* dan penyebaran kuesioner. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999 dalam proposal Andriyani 2012), metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

Penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh data diri responden dan penilaian pengaruh penerapan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengawasan melekat dan prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD. Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 1

(STS=Sangat Tidak Setuju), 2 (TS=Tidak Setuju), 3 (ATS=Agak Tidak Setuju), 4 (AS=Agak Setuju), 5 (S=Setuju) dan 6 (SS=Sangat Setuju).

Analisis data

Peneliti lebih cenderung menggunakan SmartPLS ketimbang dengan SPSS karena menurut Ghozali (2011) dengan SmartPLS merupakan metode yang *powerfull* dalam tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu namun bisa dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Selain itu, dapat memberikan definisi yang pasti dari komponen skor. Maka analisis data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan alat statistik yaitu SmartPLS dengan melakukan uji regresi berganda (*multiple regression*), karena dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh langsung antar konstruk berdasarkan hipotesis.

1. Uji statistik deskriptif
Menurut Grahita (2017) tujuan dilakukan uji statistik deskriptif adalah menguji dan menjelaskan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasilnya berupa tabel mean, deviasi standar, maksimum dan minimum yang diikuti dengan penjelasan berupa narasi yang menjelaskan interpretasi isi tabel berupa nama variabel yang diobservasi.
2. Uji asumsi klasik
Menurut Grahita (2017), uji asumsi klasik ada empat uji yang dilakukan. Uji tersebut adalah sebagai berikut
3. Uji normalitas data
Distribusi normal dalam bentuknya mengikuti fungsi Gauss dikatakan simetris apabila 68% nilai *standardized residuals* terletak antara -1 dan +1; 98% nilai *standardized residuals* terletak antara -2 dan +2 dan 99% nilai *standardized residuals* terletak antara -3 dan +3.
4. Uji heteroskedastisitas
Uji ini hanya menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varian nilai residual dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap (homokedastisitas) dan apabila terjadi perbedaan varian (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas).
5. Uji autokorelasi
Uji ini digunakan untuk menguji model regresi terdapat korelasi kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya dengan signifikansi 5% (batas atas 1.681 dan kurang dari 4) dikatakan tidak terjadi korelasi.
6. Uji multikolinearitas
Uji ini batas *tolerance* 0.100 jika nilai *tolerance* kurang dari 0.100 maka tidak terjadi multikolinearitas, batas *coefficient* kurang dari 5 maka dapat disimpulkan model regresi ini baik karena tidak terjadi multikolinearitas dan batas *coefficient correlation* memiliki batas 95% jika kurang dari 95% masih dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.
7. Uji F
Menurut Grahita (2017), Uji F dikatakan signifikan didalam regresi berganda jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0.05$ maka model persamaan regresi signifikan pada level alfa 5% (dikatakan sudah tepat).
8. Uji koefisien determinasi (R^2)
Menurut Grahita (2017), uji R^2 besaran proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Jika hasil R^2 diestimasikan sebesar 0.63 maka variasi variabel independen diformulasikan dalam model riset mampu

menjelaskan variasi variabel dependen 63%, namun jika hanya 37% dijelaskan variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model riset.

9. Uji signifikasi variabel (Uji T)

Menurut Grahita (2017) uji T merupakan uji yang dilakukan setelah uji F dinyatakan signifikan. Dengan demikian hasil yang signifikan dari uji T adalah $p \leq 0.05$ maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen signifikan secara statistik pada level alfa 5%.

HASIL

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan software PLS versi 3.0. Statistik deskriptif digunakan untuk peringkasan data dan penyajian hasil peringkasan data tersebut. Berikut tabel kategori yang digunakan untuk menilai per variabel dalam penelitian ini.

Tabel 1. Kategori

Interval	Kategori
1,00 s/d 1,82	Sangat Buruk
1,83 s/d 2,66	Buruk
2,67 s/d 3,49	Kurang Baik
3,50 s/d 4,32	Cukup Baik
4,33 s/d 5,16	Baik
5,17 s/d 6,00	Sangat Baik

Untuk mengukur gejala pusat dan variasi kelompok serta varians data dapat digunakan minimum, maksimum, *mean*, dan *standar deviation*. Hasil deskriptif variabel penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. Deskriptif variabel penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	14	2,00	6,00	5,0000	,96077
X1.2	14	1,00	6,00	4,5000	1,28602
X1.3	14	2,00	6,00	4,5714	1,01635
X1.4	14	2,00	6,00	4,7143	,99449
X1.5	14	2,00	6,00	4,6429	1,00821
X1.6	14	2,00	6,00	4,5000	1,09193
X1.7	14	2,00	6,00	4,6429	1,00821
X1.8	14	2,00	6,00	4,7857	,97496
X1.9	14	1,00	6,00	4,5000	1,28602
X1.10	14	1,00	6,00	4,4286	1,28388
X1.11	14	2,00	6,00	4,6429	1,00821
X1.12	14	2,00	6,00	4,5714	1,01635
X1.13	14	1,00	6,00	4,3571	1,39268
X1.14	14	2,00	6,00	4,5000	1,01905
X1.15	14	2,00	6,00	4,7143	,99449
X1.16	14	2,00	6,00	4,7143	,99449
X1.17	14	1,00	6,00	4,6429	1,21574
X1.18	14	1,00	6,00	4,5000	1,28602
X1.19	14	2,00	6,00	4,5714	1,01635
X1.20	14	2,00	6,00	4,7857	,97496

X1.21	14	1,00	6,00	4,2857	1,26665
X1.22	14	2,00	6,00	4,2857	1,06904
X1.23	14	2,00	6,00	4,7143	,99449
X1.24	14	2,00	6,00	4,6429	1,00821
X1.25	14	2,00	6,00	4,5714	1,01635
X1.26	14	1,00	6,00	4,4286	1,22250
X1.27	14	2,00	6,00	4,5000	1,01905
X1.28	14	2,00	6,00	4,7143	,99449
X1	14	1,71	6,00	4,5864	1,00020
X2.1	14	3,00	6,00	4,7143	1,20439
X2.2	14	3,00	6,00	4,5714	1,28388
X2.3	14	2,00	6,00	4,0714	1,68543
X2.4	14	2,00	6,00	4,2143	1,57766
X2.5	14	2,00	6,00	4,3571	1,64584
X2.6	14	3,00	6,00	4,5000	1,22474
X2.7	14	3,00	6,00	4,5714	1,15787
X2.8	14	3,00	6,00	4,6429	1,15073
X2.9	14	3,00	6,00	4,6429	1,15073
X2.10	14	3,00	6,00	4,7857	1,25137
X2.11	14	3,00	6,00	4,5714	1,28388
X2.12	14	3,00	6,00	4,7143	1,20439
X2.13	14	3,00	6,00	4,6429	1,21574
X2.14	14	3,00	6,00	4,6429	1,15073
X2	14	2,79	6,00	4,5471	1,25342
X3.1	14	1,00	6,00	4,7143	1,26665
X3.2	14	1,00	6,00	4,8571	1,16732
X3.3	14	2,00	6,00	3,8571	1,46009
X3.4	14	1,00	6,00	4,6429	1,21574
X3.5	14	2,00	6,00	3,7857	1,47693
X3.6	14	2,00	6,00	4,6429	1,00821
X3.7	14	2,00	6,00	3,9286	1,49174
X3.8	14	1,00	6,00	4,7857	1,25137
X3.9	14	2,00	6,00	3,7857	1,52812
X3.10	14	2,00	6,00	4,7857	,97496
X3.11	14	1,00	6,00	3,8571	1,65748
X3.12	14	2,00	6,00	4,6429	1,08182
X3	14	1,58	6,00	4,3564	1,10787
Y1.1	14	1,00	6,00	3,6429	1,69193
Y1.2	14	2,00	6,00	5,0000	,96077
Y1.3	14	2,00	6,00	4,8571	,94926
Y1.4	14	1,00	6,00	3,7143	1,63747
Y1.5	14	2,00	6,00	4,9286	,99725
Y1.6	14	2,00	6,00	4,8571	,94926
Y1.7	14	2,00	6,00	4,7143	,99449
Y1.8	14	1,00	6,00	4,6429	1,21574
Y1.9	14	1,00	6,00	3,7857	1,57766
Y1.10	14	1,00	6,00	4,7857	1,25137
Y	14	1,50	6,00	4,4929	1,07379
Valid N (listwise)	14				

Hasil deskriptif pada sistem informasi keuangan daerah (X1) diperoleh nilai minimum 2,00, nilai maksimal 6,00; rata-rata sebesar 5,00 dan standar deviasi sebesar 1,39268. Jika dilihat nilai rata-rata diatas 3,5 (nilai tengah antara 1 dan 6), menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah di Kabupaten Rembang termasuk dalam kriteria yang baik, sehingga sistem informasi ini mampu memberikan informasi kepada seluruh manager keuangan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan organisasi, yang dapat digunakan untuk peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui organisasi dan mengendalikan keuangan pemerintah daerah.

Hasil deskriptif pada pengawasan melekat (X2) diperoleh nilai minimum 2,79, nilai maksimal 6,00, rata-rata sebesar 4,8571 dan standar deviasi sebesar 1,28388. Jika dilihat nilai rata-rata diatas 3,5 (nilai tengah antara 1 dan 6), menunjukkan bahwa sistem pengawasan keuangan daerah termasuk dalam kriteria yang baik, sehingga usaha-usaha untuk mengawasi serta mengendalikan pegawai secara langsung yang dilakukan oleh setiap unsur pimpinan dalam suatu organisasi, dirasakan telah efektif dan mampu menjangkau semua lini dalam unit kerja yang ada.

Untuk variabel prinsip transparansi (X3) diperoleh nilai minimum 2,00, nilai maksimal 6,00, rata-rata sebesar 4,8571 dan standar deviasi sebesar 1,65748. Jika dilihat nilai rata-rata diatas 3,5 (nilai tengah antara 1 dan 6), menunjukkan prinsip transparansi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Rembang dapat dikategorikan baik. Artinya informasi yang disampaikan anggota DPRD Kabupaten Rembang kepada publik telah transparan, mudah diakses, dan disampaikan tepat waktu. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Hasil deskriptif pada akuntabilitas pengelolaan APBD (Y) diperoleh nilai minimum 2,00 nilai maksimal 6,00, rata-rata sebesar 4,4929 dan standar deviasi sebesar 1,07379, menunjukkan bahwa akuntansibilitas pengelolaan APBD di Kabupaten Rembang termasuk dalam kriteria yang baik. Artinya dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan di DPRD Kabupaten Rembang mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Uji normalitas data

Distribusi normal dalam bentuknya mengikuti fungsi Gauss dikatakan simetris apabila 68% nilai *standardized residuals* terletak antara -1 dan +1; 98% nilai *standardized residuals* terletak antara -2 dan +2 dan 99% nilai *standardized residuals* terletak antara -3 dan +3. Berikut tabel uji normalitas data. Distribusi normal dalam bentuknya mengikuti fungsi Gauss dikatakan simetris apabila 68% nilai *standardized residuals* terletak antara -1 dan +1; 98% nilai *standardized residuals* terletak antara -2 dan +2 dan 99% nilai *standardized residuals* terletak antara -3 dan +3. Berikut tabel uji normalitas data.

Tabel 3 Residuals statistics

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.5000	6.0000	4.4929	1.07379	14
Residual	.00000	.00000	.00000	.00000	14
Std. Predicted Value	-2.787	1.404	.000	1.000	14
Std. Residual	.000	.000	.000	.000	14

a. Dependent Variable: Y

Hasil perhitungan diketahui bahwa nilai standar residual terletak antara nilai min 0.000 dan nilai maksimal 0.000 maka dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y memiliki distribusi normal dalam bentuknya mengikuti fungsi Gauss dikatakan simetris apabila 68% nilai *standardized residuals* terletak antara -1 dan +1.

Uji heteroskedastisitas

Uji ini hanya menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varian nilai residual dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap (homokedastisitas) dan apabila terjadi perbedaan varian (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas).

Tabel 4. ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14.989	12	1.249		^a
Residual	.000	1	.000		
Total	14.989	13			

a. Predictors: (Constant), X3, X2.10, X1.28, X2.3, X3.8, X1.2, X1.3, X2.6, X1.23, X3.12, X3.2, X1.13

b. Dependent Variable: Y

Hasil perhitungan nilai residual berada pada nilai 0.000 yang berarti bahwa model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varian nilai residual dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain atau model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas).

Uji autokorelasi

Model regresi terdapat korelasi kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya dengan signifikansi diatas 5% (batas atas 1.681 dan kurang dari 4) dikatakan tidak terjadi korelasi.

Tabel 5. Autokorelasi

	X1	X2	X3	Y
X1	1,000000			
X2	0,652027	1,000000		
X3	0,934225	0,563379	1,000000	
Y	0,969595	0,529147	0,962288	1,000000

Variable SKID (X1), sistem pengawasan melekat (X2) dan prinsip transparansi (X3) memiliki tingkatan signifikansi yang tinggi karena memiliki *significancy* di atas 0.5.

Uji multikoloniaritas

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y, memiliki batas *coefficient correlation* memiliki batas 95% jika kurang dari 95% maka dapat disimpulkan model regresi ini baik karena tidak terjadi multikolonieritas dan batas. Selain itu, batas *tolerance* 0.100 jika nilai *tolerance* kurang dari 0.100 dari setiap variabel baik X1, X2 dan X3 maka tidak terjadi multikolonieritas. Hal ini terlihat pada tabel berikut.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.049E-14	.000		.000	1.000					
X1.2	-.059	.000	-.071	-961520.498	.000	.833	-1.000	-.007	.009	116.246
X1.3	.110	.000	.104	3908001.251	.000	.878	1.000	.027	.066	15.083
X1.13	.114	.000	.148	1741909.826	.000	.809	1.000	.012	.006	155.000
X1.23	-.105	.000	-.097	-1848763.031	.000	.848	-1.000	-.013	.017	58.897
X1.28	.333	.000	.309	1.063E7	.000	.891	1.000	.073	.055	18.066
X2.3	.028	.000	.044	2098712.856	.000	.502	1.000	.014	.107	9.317
X2.6	-.081	.000	-.093	-3299643.496	.000	.488	-1.000	-.023	.059	16.952
X2.10	.010	.000	.011	266487.238	.000	.457	1.000	.002	.027	37.426
X3.2	.463	.000	.504	8912772.736	.000	.920	1.000	.061	.015	68.442
X3.8	-.354	.000	-.413	-1.427E7	.000	.812	-1.000	-.098	.056	17.933
X3.12	-.087	.000	-.088	-1825684.643	.000	.865	-1.000	-.012	.020	49.324
X3	.629	.000	.649	1.579E7	.000	.958	1.000	.108	.028	36.104

a. Dependent Variable: Y

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14,575	3	4,858	117,247	,000 ^a
	Residual	,414	10	,041		
	Total	14,989	13			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Uji F dikatakan signifikan didalam regresi berganda jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0.05$ maka model persamaan regresi signifikan pada level alfa 5% (dikatakan sudah tepat). Hasil dari statistik menunjukkan bahwa signifikansinya 0.000 hal ini menunjukkan bahwa model persamaan regresi sudah tepat.

Uji R²

Untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh *substantive*. Berikut adalah tabel pengaruhnya:

Tabel 7. R Square

	R Square	Cronbachs Alpha
X1		0,993372
X2		0,994807
X3		0,967516
Y	0,977439	0,971326

Dalam perhitungan R^2 sebesar 0.977239 maka variasi variabel independen diformulasikan dalam model riset mampu menjelaskan variasi variabel dependen 97%, namun jika hanya 3% dijelaskan variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model riset.

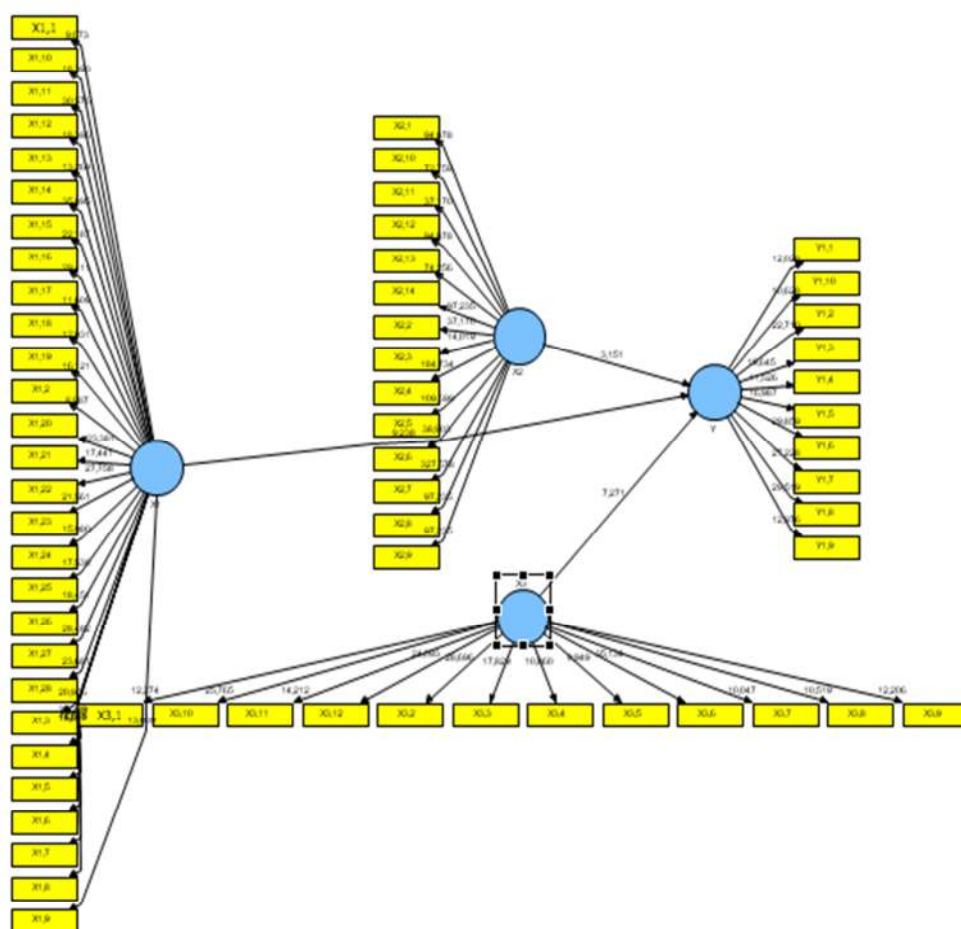
Uji signifikasi variabel (uji T)

Setelah mengetahui dan melakukan berbagai uji yang telah dipaparkan sebelumnya maka didapatkan hasil pengujian hipotesis. Berikut adalah hasil uji hipotesis.

Tabel 8. T-statistic

	T Statistics (O/STERR)
X1 -> Y	9,237760
X2 -> Y	3,150699
X3 -> Y	7,270543

Hasil tersebut dapat dibaca dengan melakukan uji t statistik yaitu dengan membandingkan antara hasil t hitung (t statistik) dengan t tabel. Dalam hal ini t tabel ditentukan signifikan pada 0,05 ($t \text{ hitung}/T\text{-statistics} >$ daripada t tabel 1,96). Dengan adanya tabel 4.12 tersebut diatas, maka dapat disajikan seperti gambar 4.1 berikut ini



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD

Setelah melakukan pengujian terhadap data maka didapatkan hasil bahwa pengaruh sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD, terbukti dari hasil *Inner Model* mempunyai t statistik sebesar 9,237760. Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik > t tabel 1,96). Ini berarti bahwa Hipotesis1 (H_1) yang menyatakan bahwa “Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD”

Semakin baik penerapan sistem informasi keuangan daerah maka sistem ini akan memberikan manfaat yang lebih banyak seperti membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban; menyusun laporan keuangan yang lebih efektif dan akurat; menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya; dan menyajikan informasi yang akurat, efektif dan efisien bagi pengguna laporan. Penerapan sistem informasi keuangan daerah yang akurat akan mempengaruhi informasi/pengelolaan keuangan yang akurat juga, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka “penerapan sistem informasi keuangan dapat berperan positif dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan APBD”.

2. Pengaruh sistem pengawasan melekat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD

Setelah melakukan pengujian terhadap data maka didapatkan hasil bahwa pengaruh sistem pengawasan melekat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD mempunyai t statistik sebesar 3,150699. Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik > t tabel 1,96), ini berarti bahwa Hipotesis2 (H_2) yang menyatakan bahwa “*Sistem pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.*”

Menurut Rubin (1996) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan dipengaruhi oleh fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Oleh karena itu, pemerintah dikatakan memiliki akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik jika pemerintah tersebut mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat; mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif.

3. Pengaruh prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD

Setelah melakukan pengujian terhadap data maka didapatkan hasil bahwa pengaruh prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD mempunyai t statistik sebesar 7,270543. Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik > t tabel 1,96), ini berarti bahwa Hipotesis3 (H_3) yang menyatakan bahwa “*Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.*”

Menurut Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan memberikan keleluasan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendapatkan akses informasi yang diperlukan dengan berbagai media yang dimungkinkan. Dengan demikian penerapan prinsip transparansi terhadap pengelolaan keuangan akan mendorong terciptanya keterbukaan publik atas pengelolaan keuangan. Mengingat keterbukaan publik atau kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang diperlukan menjadi bagian penting dari akuntabilitas, maka penerapan prinsip transparansi terhadap pengelolaan keuangan akan mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan APBD. Dengan kata lain penerapan prinsip transparansi atas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

Saran

1. Bagi sekretariat DPRD kabupaten Rembang, hendaknya dalam meningkatkan kinerja sistem informasi keuangan daerah, yang relevan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu fungsi pengawasan pada anggota Dewan hendaknya dapat berjalan dengan baik sehingga proses atau usaha-usaha untuk

mengawasi serta mengendalikan pegawai secara langsung yang dilakukan oleh setiap unsur pimpinan dalam suatu organisasi, sehingga dirasakan lebih efektif untuk mampu menjangkau semua lini dalam unit kerja yang ada. Selain itu proses penyusunan APBD ini hendaknya lebih transparan kepada publik dengan menyediakan berbagai akses informasi yang mudah.

2. Penelitian ini mengambil obyek yang terbatas yakni pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Pada peneliti berikutnya perlu dilakukan pengamatan dengan obyek yang lebih luas, sehingga lebih dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Nurulita. 2012. *Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Intelektual terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi*. Proposal-S1. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Anthony, Robert N and Govindarajan, Vijay. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 12. Karisma Publishing Group. Tangerang.
- Atarwaman, Rita J. D. 2008. *Pengaruh Struktur Kewenangan, Karakteristik Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Perilaku Manajer terhadap Cost Consciousness*. Tesis S-2. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Cooper, Donald R dan Schinder, Pamela S. 2006. *Metode Riset Bisni*, Edisi Sembilan. PT Media Global Edukasi. Jakarta.
- Departemen Keuangan RI. 2006. *Kumpulan Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Nomor 33 Tahun 2004*. Cetakan I. Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Deutari, Cindy. 2012. *Pengaruh Pengawasan Melekat dan Fungsi Anggaran terhadap Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Pemerintah Kota Tasikmalaya*. skripsi S-1. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Edisi 5. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equaling Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Krismiaji. 2005. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi kedua. Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Cetakan Pertama. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Malichah, Hikmah Nurul. 2010. *Pengaruh Kejelasan dan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Yogyakarta*. Skripsi S-1. Fakultas Ekonomi. Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiyanto, Handono. 2009. *Inti sari manajemen keuangan*. Jakarta. Grasindo.

- Martani, Dwi dan Zaelani, Fazri. 2011. *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi S-1. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Aceh.
- Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Cetakan Ke-1. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik Di Daerah*. Tesis S-2. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Santoso, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governanc*. Cetakan Pertama. PT Refika Aditama. Bandung.
- Solikhah, Bangdiyatus, Rohman, dan Meiranto. 2010. *Implikasi Intellectual Capital terhadap Financial Performance, Growth dan Market Value; Studi Empiris dengan Pendekatan Simplitic Specification*. Tesis S-2. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2010. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Skripsi S-1. Universitas Widya Gama Malang. Malang.
- Suhanda Wati, Sinta. 2007. *Analisis atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Kota Bandung*. Skripsi S-1. Universitas Komputer Indonesia. Jakarta.
- Sulistoni. 2003. *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*. Somasi. Nusa Tenggara Barat.
- Ulum MD, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Ulum, Ihyaul, Imam Ghozali dan Anis Chariri. 2010. *Intellectual Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan; Suatu Analisis Pendekatan Partial Least Squar*. Paper. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Widayaningsih, Aristanti, Triantoro, Alvian, dan Wiyantoro, Lili Sugeng. 2011. *Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening*. Skripsi S-1. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Aceh.
- Widjaja, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Edisi 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.